# KEPATUHAN PALING RENDAH, SAROLANGUN MINTA PETUNJUK OMBUDSMAN

**Jum'at, 24 Januari 2020 - Korinna Al Emira**

Jambi - Ombudsman RI telah merilis hasil Kepatuhan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tahun 2019. Terkhusus untuk Provinsi Jambi terdapat 6 Kabupaten/Kota dan Provinsi Jambi yang menjadi objek penilaian Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi. Salah satunya adalah Kabupaten Sarolangun.

Dari hasil penilaian, didapati bahwa Kabupaten Sarolangun mendapatkan nilai paling rendah yakni 54,32 atau berada pada Zona Kuning dengan Tingkat Kepatuhan Sedang.

Atas hasil tersebut Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jambi, yakni Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si menyayangkan hal ini. "Sebenarnya 2018 Sarolangun juga mendapatkan Zona Kuning, tapi 2019 ini nilai Zona Kuningnya lebih rendah dibanding tahun 2018," kata Jafar. Tentunya hasil ini menjadi catatan buruk bagi Kabupaten Sarolangun.

Atas dasar hasil penilaian kepatuhan dari Ombudsman RI, Kepala DPMPTSP Kabupaten Sarolangun sebelumnya diganti oleh Bupati Sarolangun dan diserahkan kepada Ahmad Nasri. Maka pada Jumat (24/01/2020), Kepala DPMPTSP Kabupaten Sarolangun dan 1 (satu) orang Staf Biro Organisasi Kabupaten Sarolangun mendatangi kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi untuk meminta petunjuk atas hasil penilaian kepatuhan 2019.

"Setelah melihat hasil kepatuhan dari Ombudsman, saya langsung rapat dengan staf-staf untuk melakukan perbaikan," kata Ahmad. Salah satu perbaikan yang sedang DPMPTSP laksanakan adalah dengan mempersiapkan SOP dan website resmi kabupaten. Selain itu produk-produk yang ada sedang mereka usahakan untuk diintegrasikan ke OSS.

Korinna Al Emira, selaku penanggungjawab Kepatuhan 2019 mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Sarolangun. "Kita hanya minta untuk diperbaiki supaya tahun 2020 Sarolangun bisa mendapat Zona Hijau," kata Korinna.